

MAPPING MARKET SECTORAL SEBAGAI DASAR OPTIMALISASI INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Intan Rohimah
Pesantren Al Es'af Surakarta
Jl. Tejonoto I RT 02 RW 05 Jogosuran Danukusuman Surakarta 57156
Email : intanelbandung@yahoo.com HP : 085728783591

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara perbankan Syariah dan sembilan sektor yang berkontribusi terhadap GDP provinsi melalui aliran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10% yang berasal dari APBD. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi dan menghasilkan hubungan positif antara keduanya. Melalui *mapping market sectoral*, kinerja Perbankan Syariah lebih diarahkan menjadi Bank Investasi terhadap sektor usaha daerah. Pelayanan intermediasi Perbankan Syariah bisa lebih terpompa dengan adanya sinergi bersama Pemerintah melalui peraturan yang dikeluarkan bersama Menteri Keuangan sebagai regulator, dan hal ini bisa berimbas pada meningkatnya kinerja di beberapa sektor usaha daerah serta secara agregat bisa meningkatkan GDP nasional. Penelitian ini pun menunjukkan bahwa perbankan Syariah saat ini bisa diterapkan pada era otonomi daerah seperti sekarang karena hal tersebut memiliki efek berkelanjutan kepada kedua pihak, perbankan Syariah dan Pemerintah daerah.

Keywords: Perbankan Syariah, Pemerintah daerah, Otonomi daerah, Intermediasi, market Sectoral

This study was conducted to analyze the relationship between Islamic banking and the nine sectors that contribute to the province's GDP flows through the Third Party Funds (TPF) of 10% is derived from the budget. Testing is done by regression analysis and generate a positive relationship between them. Through *Maaping sectoral market*, the performance of Islamic Banking Investment Bank is directed to the local business sector. Islamic Banking intermediation services can be pumped through synergy with regulations issued by the Government through the Minister of Finance as the regulator, and this could impact on the improved performance in some business sectors as well as in the aggregate area could increase the national GDP. This study also shows that the current Islamic banking can be applied to the era of regional autonomy as it is now because it has a sustained effect to the parties, Islamic banking and local government.

Keywords: Islamic Bank, Local Government, Outonomy, Intermediation and Market Sectoral

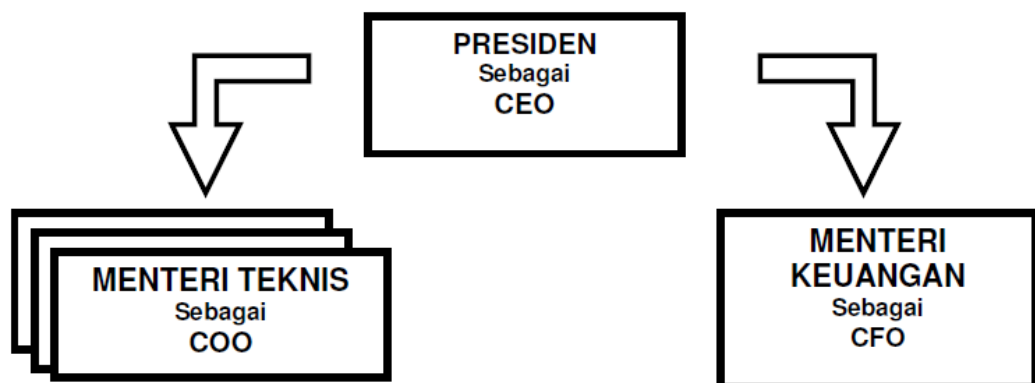
1. Pendahuluan

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hingga akhir Agustus 2013, tercatat jumlah jaringan kantor sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sehingga seluruh jaringan kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas mencapai 2,872 unit. Indikator internal perbankan syariah antara lain; *Financing to Deposit Ratio (FDR)* rata-rata sebesar 102.53% jauh lebih tinggi dari pada bank konvensional dengan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* rata-rata sebesar 79.43%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *intermediary* di bank syariah dapat berjalan lebih baik dari bank konvensional. Untuk risiko kredit macet *Non Performing Loan (NPL)* atau di dalam bank syariah dinamakan *Non Performing Finance (NPF)*, bank syariah lebih rendah yaitu sebesar 3.01 sedang bank konvensional sebesar 6.56. Hal ini menunjukkan bahwa kredit macet di bank syariah lebih kecil dari pada bank konvensional. ROE mencapai 17.97 dan ROA sebesar 2.01 (Statistik Perbankan Syariah, Februari 2013).

Aset bank syariah di tahun 2012 mampu tumbuh 47,20% sementara bank konvensional hanya 11,80%. Pembiayaan bank syariah tumbuh 48,81% dan di bank konvensional hanya 20,29%. Penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah tumbuh hingga 50,91% sementara di bank konvensional hanya 12,98%. Namu pangsa pasar bank syariah baru mencapai 4,39%.

Di sisi lain, era otonomi daerah identik dengan desentralisasi yang dianggap sebagai bentuk pelimpahan otoritas fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Mauro, 2005). Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah otonom berhak mengurus urusan pemerintahannya yang tertulis pada Pasal 12 UU No 32 Tahun 2004.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Presiden berfungsi sebagai *Chief Executive Officer (CEO)* dan Menteri Keuangan berperan dan berfungsi sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* sedangkan menteri/pimpinan lembaga berperan sebagai *Chief Operating Officers (COO)*. Hubungan tersebut tergambar seperti pada gambar;



Gambar : Hubungan CEO, COO, dan CFO pada Birokrasi Negara

Sumber : Suminto, 2004

Kementerian Keuangan bertanggungjawab untuk mengelola pendapatan Negara, pengeluaran negara dan aset negara melalui pengelolaan APBN. Pada tahun 2013 APBN di atas Rp 1,600 triliun, naik dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Angka tersebut akan semakin membesar karena ekonomi Indonesia tumbuh dengan amat baik, bahkan diramalkan banyak pengamat pada tahun 2030 kita akan menjadi ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Perjalanan bangsa kita 15-20 tahun lagi akan sangat krusial untuk menentukan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju yang berpendapatan tinggi dan berkeadilan sosial. Peranan Kementerian Keuangan akan semakin penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang *pro-growth* dan *pro-poor* melalui instrumen kebijakan fiskal (Depkeu, 2013).

Momen ini membawa peluang pada perkembangan perbankan syariah, di mana Bank Indonesia sudah memfasilitasi dengan kerangka dual-banking system. Hal ini berarti sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Mekanisme dapat direalisasikan dengan penyimpanan dana APBN/APBD di perbankan syariah, mengingat bahwa selama ini pengelolaan APBN/APBD *full conventional banking*.

Dari pemaparan di atas, guna merespon perkembangan industri keuangan perbankan di era otonomi daerah, maka penelitian ini akan menganalisis dan mensimulasikan bagaimana pertumbuhan perbankan syariah jika terdapat sinergi antara perbankan syariah dengan lembaga-lembaga negara/ daerah dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan negara/ daerah yang berimplikasi pada perkembangan perbankan syariah, melalui regulasi.

2. Metodologi

Penelitian menggunakan data panel dalam tahunan kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2011 dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Laporan Realisasi APBD provinsi. Provinsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah provinsi yang di dalamnya sudah berdiri Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah, dan terdapat sebanyak 15 provinsi sehingga jumlah observasinya 45.

2.1 Spesifikasi model

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model 1

$$\Delta P_{j,t} = SWBI_{j,t} + \Delta DPK_{j,t} + \Delta JB_{j,t} + S_{1j,t} + S_{2j,t} + S_{3j,t} + S_{4j,t} + S_{5j,t} + S_{6j,t} + S_{7j,t} + S_{8j,t} + S_{9j,t} + \varepsilon$$

Model 2

$$\Delta PDRB_{i,j,t} = SWBI_{j,t} + \Delta DPK_{j,t} + \Delta JB_{j,t} + \Delta pembiayaan_{j,t} + \varepsilon$$

Di mana

- P : Penyaluran pembiayaan di perbankan syariah (juta rupiah)
- PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)
- SWBI : Sertifikat Wadian Bank Indonesia (juta rupiah)
- DPK : DPK diprosikan 10% dari total APBD Provinsi (juta rupiah)
- JB : Jumlah BPD Syariah, termasuk Kantor Kas dan *Office Channeling* (unit)
- S1 : PDRB Provinsi Sektor Pertanian (juta rupiah)
- S2 : PDRB Provinsi Sektor Pertambangan dan penggalian (juta rupiah)
- S3 : PDRB Provinsi Sektor Industri pengolahan (juta rupiah)
- S4 : PDRB Provinsi Sektor Listrik, gas dan air bersih (juta rupiah)
- S5 : PDRB Provinsi Sektor Konstruksi (juta rupiah)
- S6 : PDRB Provinsi Sektor Perdagangan, hotel & restoran (juta rupiah)
- S7 : PDRB Provinsi Sektor Pengangkutan dan komunikasi (juta rupiah)
- S8 : PDRB Provinsi sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (juta rupiah)
- S9 : PDRB Provinsi Sektor Jasa-jasa (juta rupiah)
- i : sektor/ lapangan USAHA (S1, S2, S3, S4, S5, S5, S7, S8, S9)
- j : provinsi
- t : periode

2.2 Regresi linier dengan data panel

Verbeek (2012: 310) mengemukakan bahwa keuntungan regresi dengan data panel adalah kemampuan regresi data panel dalam mengidentifikasi parameter-parameter regresi secara pasti tanpa membutuhkan asumsi restriksi atau kendala. Menurut Baltagi (2005), keunggulan penggunaan data panel dibanding data runtun waktu dan data lintas sektoral adalah: 1) Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap unit; 2) Dengan data panel, data lebih informatif, mengurangi kolinieritas antara variabel, meningkatkan derajat kebebasan dan lebih efisien; 3) data panel cocok untuk menggambarkan adanya dinamika perubahan; 4) Data panel dapat lebih mampu mendeteksi dan mengukur dampak; 5) Data panel bisa digunakan untuk studi dengan model yang lebih lengkap; 6) Data panel dapat meminimumkan bias yang mungkin dihasilkan dalam agregasi. Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2008) terdapat 3 (tiga) prosedur estimasi data panel: 1) Regresi penggabungan semua data; 2) regresi dengan variabel *dummy* untuk mengetahui perubahan intersep runtun waktu dan lintas sektor; 3) *error component model*. Estimasi model regresi penggabungan semua data untuk intersep dan koefisien slope konstan setiap waktu dan unit biasa disebut juga dengan estimasi regresi data panel dengan metode *Pooled Least Square*, yang mempunyai bentuk spesifikasi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Jika model regresi diasumsikan mempunyai koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi tiap unit maka digunakan variabel *dummy* waktu dan unit.

$$Y_{it} = \beta_{1t} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \quad \dots\dots\dots(2)$$

Model (2) ini dikenal dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Intersep meskipun bervariasi tiap unit tapi tidak berbeda dalam tiap waktu (*time invariant*). Variabel dummy digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan koefisien tiap unit (*differential intercept dummies*) dan model dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \beta_{2it} X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Model (2) ini dikenal juga sebagai *Covariance Model*. Salah satu alasan digunakannya *fixed effect model* adalah karena, kesimpulan (*inferensi*) yang akan diambil dari model yang akan diteliti hanya akan mempertimbangkan efeknya pada sampel yang ada dan bukan pada populasi. Hal ini berlainan dengan tujuan dipakainya *random effect model*, yaitu untuk melihat efeknya pada populasi dalam mengambil kesimpulan (Verbeek, 2012).

Selanjutnya, model estimasi regresi data panel yang ketiga adalah *error component model* atau disebut juga *Random Effect Model* (REM). Model REM ini melibatkan korelasi antar *error term* karena berubahnya waktu maupun karena berbedanya unit observasi. Model dasarnya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{1t} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \quad \dots\dots\dots(3)$$

Ketiga model tersebut di atas akan berbeda dalam intepetasi analisisnya sehingga perlu dilakukan pemilihan model untuk memperoleh estimasi yang efisien sesuai dengan penggunaan regresi data panel.

2.3 Uji statistik F

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode PLS tanpa variabel *dummy* atau memilih *fixed effect*. Uji statistik F yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut (Verbeek, 2012):

$$F(n-1, nT-n-K) = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/(n-1)}{(1 - R_{UR}^2)/(nT-n-K)}$$

Di mana,

- R_{UR}^2 : mengacu pada *unrestricted model*
- R_R^2 : mengacu pada *restricted model*
- n : jumlah unit *cross section*
- T : jumlah unit waktu
- K : jumlah parameter yang akan diestimasi

Jika ternyata hasil perhitungan F stat $\geq F(n-1, nT-n-K)$, berarti H_0 ditolak, artinya intersep untuk semua *cross section* tidak sama. Dalam hal ini, *FEM* digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi. Sementara itu, hal-hal yang harus diperhatikan jika menggunakan *FEM* (Verbeek, 2012). Pertama,

penggunaan variabel dummy akan menimbulkan masalah *degrees of freedom*. Kedua, kemungkinan terjadi multikolienaritas. Ketiga, *FEM* tidak bisa digunakan untuk mengetahui dampak variabel yang *invariant* (misal, jenis kelamin, ras, dll). Keempat, *error term* harus diperhatikan sehingga asumsi klasik *error term* harus dimodifikasi.

2.4 Uji *lagrange multiplier*

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel *dummy* atau memilih *random effect*. Uji Lagrange Multiplier (LM) yang dapat dilakukan adalah (Verbeek, 2012):

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^n e_{it})}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^n e_{it}^2} - 1 \right)^2$$

Di mana, n : jumlah individu
 T : jumlah periode waktu
 e : residual metode OLS

Jika perhitungan $LM > X^2$ dengan satu derajat kebebasan, maka H_0 ditolak, artinya *REM* bisa digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi.

2.5 Uji *hausman*

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)*. Hipotesis dari uji Hausman adalah:

H_0 : estimator *random* konsisten

H_a : estimator *random* tidak konsisten

Di mana H_0 diterima artinya *REM* lebih baik digunakan daripada *FEM*, dan sebaliknya. Maka H_0 diterima/ ditolak jika:

$X^2_{\text{tab}} > X^2_{\text{hit}}$: H_0 diterima
 $X^2_{\text{tab}} < X^2_{\text{hit}}$: H_0 ditolak

Untuk mendapatkan nilai X^2_{hit} diambil dari perbedaan nilai beta dan *covarian* setiap metode. Uji statistik Hausman yang dapat dilakukan adalah (Hausman, 1978):

$$W = \frac{(\bar{\beta}_{FEM} - \bar{\beta}_{REM})^2}{(V(\bar{\beta}_{FEM}) - V(\bar{\beta}_{REM}))} \sim X^2(1)$$

dan untuk *multivariate*,

$$W = (\bar{\beta}_{FEM} - \bar{\beta}_{REM}) (V(\bar{\beta}_{FEM}) - V(\bar{\beta}_{REM}))^{-1} (\bar{\beta}_{FEM} - \bar{\beta}_{REM}) \sim X^2(k)$$

Uji statistik Hausman ini mengikuti distribusi *chi-square* (X^2) dengan *degrees of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika

nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *FEM*, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *REM*. Menurut Judge (1985), ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan pendekatan mana yang dipilih (*FEM* atau *REM*) dalam estimasi panel data, yaitu: Jika ε dan X berkorelasi, maka lebih baik menggunakan *FEM*, dan jika ε dan X tidak berkorelasi, maka lebih baik digunakan *REM*, Jika T (jumlah *time series*) besar dan n (jumlah individu/ unit) kecil, perbedaan keduanya relatif kecil, maka lebih baik menggunakan *FEM*, Jika n besar dan T kecil, digunakan *FEM* apabila unit tidak *random* dari sampel yang besar dan digunakan *REM* apabila unit diambil secara *random* dan Jika n besar dan T kecil dan apabila asumsi *REM* terpenuhi, estimator *REM* lebih efisien dibandingkan *FEM*.

3. Hasil analisis dan pembahasan

3.1 Analisis model 1

Berikut hasil analisis regresi model 1;

Tabel 1
Hasil Analisis Data – Model 1 (Variabel Dependen Pembiayaan)

Variable	Coefficient	t-Statistik	Prob.
SWBI	0.094395	1.356987	0.1843
DPK	24684.70	0.040309	0.9681
JB	0.036272	1.120616	0.2708
S1	-2.032974	-3.685940	0.0008
S2	0.390120	1.347898	0.1872
S3	0.152610	3.229230	0.0029
S4	0.150965	1.368922	0.1806
S5	0.126656	1.259092	0.2171
S6	-0.539991	-3.277019	0.0025
S7	5.486453	5.977325	0.0000
S8	5.613269	1.189721	0.1042
S9	-2467.091	-0.040287	0.9681
C	526140.1	1.203992	0.2374

Sumber : Hasil Analisi Data dengan Eviews 6

Secara umum model tersebut *fit*, yang ditunjukkan dengan $R^2 = 97.99\%$ dan F statistik 130.28 (prob 0.0000), serta konstanta (c) yang tidak signifikan (t-Statistik 1.2 dan probability 0.24). Dana Pihak Ketiga (DPK) diprosikan dengan 10% dari total APBD Provinsi. Asumsinya, penempatan dana APBD di perbankan syariah, akan berimplikasi pada perkembangan perbankan syariah yang digambarkan dengan jumlah penyaluran pembiayaan.

Dalam konteks ini variabel SWBI, DPK, dan jumlah bank tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan di perbankan syariah. PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha juga berkontribusi terhadap pembiayaan di perbankan syariah.

Dari sembilan sektor penyumbang PDRB provinsi, sektor pengangkutan dan komunikasi yang paling berpengaruh terhadap pembiayaan di perbankan syariah. Setiap kenaikan jumlah PDRB di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar satu juta rupiah, maka pembiayaan di perbankan syariah akan naik sebesar Rp 5.49 juta. Secara statistik, hubungan ini signifikan dengan α 1% (t-statistik 5.98 dan probability 0.0000). Meskipun sektor ini sudah optimal, perlu optimalisasi pembiayaan agar lebih efisien.

Untuk sektor industri pengolahan, setiap terjadi kenaikan PDRB di sektor industri pengolahan satu juta rupiah, akan berimplikasi pada kenaikan pembiayaan di perbankan syariah sebesar Rp 0.15 juta. Secara statistik, hubungan ini signifikan dengan α 5% (t-statistik 3.23 dan probability 0.0029). Kenaikan PDRB di sektor industri pengolahan dan kenaikan pembiayaan di perbankan syariah perbandingannya tidak sepadan, hanya 7 : 1, maka dari itu perlu optimalisasi pembiayaan di sektor industri pengolahan agar lebih efisien.

Di sisi lain, PDRB di sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan dan pembiayaan di perbankan syariah memiliki perbandingan yang cukup tinggi, yaitu 1 : 6. Setiap terjadi kenaikan PDRB di sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan maka pembiayaan di perbankan syariah akan naik sebesar Rp 5.61 juta. Hubungan ini signifikan dengan α 10% (t-statistik 1.31 dan probability 0.1042).

Beberapa sektor ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap pembiayaan di perbankan syariah. Artinya setiap terjadi kenaikan PDRB di sektor-sektor tersebut, justru akan menurunkan pembiayaan di perbankan syariah. Di antara sektor yang berhubungan negatif tersebut adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor jasa-jasa.

Pada sektor pertanian, setiap terjadi kenaikan PDRB sebesar satu juta rupiah, maka pembiayaan di perbankan syariah akan turun hingga Rp 2.03 juta. Hubungan ini signifikan dengan α 1% (t-statistik -3.68 dan probability 0.0008).

Sama halnya dengan sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran setiap kenaikan PDRB sebesar satu juta rupiah, akan berdampak pada penurunan pembiayaan di perbankan syariah sebesar Rp 0.54 juta. Hubungan ini signifikan dengan α 1% (t-statistik -3.27 dan probability 0.0025).

Sektor jasa-jasa juga berhubungan negatif dengan pembiayaan di perbankan syariah, meskipun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Beberapa sektor ekonomi yang berhubungan negatif terhadap pembiayaan di perbankan syariah tersebut mengindikasikan ketidakefisienan, maka dari itu perlu optimalisasi pembiayaan di sektor-sektor tersebut agar menjadi efisien. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan optimalisasi pembiayaan di sektor-sektor yang sudah efisien, dengan tujuan agar sektor-sektor tersebut lebih efisien dan efektif. Dengan kata lain kondisi ini mengindikasikan optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah berbasis otonomi daerah, yang mempunyai *multiplier effect* baik pada perbankan syariah maupun pada Pemda. Salah satu dampak yang riil adalah pertumbuhan sektor riil di tiap daerah, yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

3.2 Analisis model 2

3.2.1 Sektor pertanian (S1)

$$S1 = 13331990 + 3.38 P + 11.19 SWBI + 3.76 DPK + 18547.45 JB$$

$(0.99) \quad (2.77)** \quad (3.34)** \quad (3.44)** \quad (0.48)**$
 $R^2 = 0.99 \quad F = 104$

PDRB di sektor pertanian akan meningkat dengan adanya alokasi dana APBD sebesar 10% di perbankan syariah. Jika penyaluran pembiayaan perbankan syariah di sektor pertanian naik satu juta rupiah, maka PDRB sektor pertanian akan naik sebesar Rp 3.38 juta. Adanya kenaikan DPK perbankan syariah sebesar satu juta rupiah, akan berimplikasi pada peningkatan PDRB sektor pertanian sebesar Rp 3.76 juta. Jika satu bank syariah baru berdiri dan beroperasi, maka PDRB sektor pertanian di wilayah pendirian bank tersebut akan naik sebesar Rp 18,547.45 juta.

3.2.2 Sektor pertambangan dan penggalian (S2)

$$S2 = 7766757 + 0.28P + 9.83SWBI + 2.55DPK + 93736.63JB$$

$(1.39) \quad (1.23)* \quad (2.91)** \quad (2.32)** \quad (2.42)**$
 $R^2 = 0.99 \quad F = 100$

PDRB di sektor pertambangan dan penggalian akan meningkat dengan adanya alokasi dana APBD sebesar 10% di perbankan syariah. Jika penyaluran pembiayaan perbankan syariah di sektor pertambangan dan penggalian naik satu juta rupiah, maka PDRB sektor pertambangan dan penggalian akan naik sebesar Rp 1.23 juta. Adanya kenaikan DPK perbankan syariah sebesar satu juta rupiah, akan berimplikasi pada peningkatan PDRB sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 2.55 juta. Jika satu bank syariah baru berdiri dan beroperasi, maka PDRB sektor pertambangan dan penggalian di wilayah pendirian bank tersebut akan naik sebesar Rp 93,736.63 juta.

3.2.3 Sektor industri pengolahan (S3)

$$S3 = 26375260 + 0.28 P + 9.83 SWBI + 2.57 DPK + 7996.836 JB$$

$(2.08)** \quad (0.35) \quad (-0.51) \quad (1.83)** \quad (0.12)$
 $R^2 = 0.99 \quad F = 22$

Dari empat variabel yang dipilih, hanya variabel DPK yang signifikan berpengaruh terhadap PDRB di sektor industri pengolahan ($\alpha = 5\%$). Setiap terjadi kenaikan DPK di perbankan syariah sebesar satu juta rupiah, maka terhadap PDRB di sektor industri pengolahan akan meningkat sebesar Rp 2.57 juta.

3.2.4 Sektor listrik, gas dan air bersih (S4)

$$S4 = 1145928 + 0.57P + 2.46SWBI - 0.61DPK + 3926.98JB$$
$$(7.83)^{***} \quad (2.38)^{**} \quad (3.71)^{***} \quad (-2.82)^{**} \quad (1.526)^*$$
$$R^2 = 0.99 \quad F = 452$$

Pada sektor listrik, gas dan air bersih, tiap terjadi kenaikan pembiayaan di perbankan syariah sebesar satu juta rupiah, maka PDRB sektor listrik, gas dan air bersih akan naik sebesar Rp 0.57 juta. Jika ada penambahan unit bank, maka tiap kenaikan satu unit bank, akan berdampak pada peningkatan PDRB sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp 3,926.98 juta. Sedangkan DPK berhubungan terbalik, yang mana setiap terjadi kenaikan DPK di perbankan syariah sebesar satu juta rupiah, justru PDRB sektor listrik, gas dan air bersih akan menurun hingga Rp 0.61 juta.

3.2.5 Sektor konstruksi (S5)

$$S5 = 5000294 + 0.89 P + 4.05 SWBI - 0.69 DPK + 49055.85 JB$$
$$(6.57)^{***} \quad (2.72)^{**} \quad (1.17) \quad (-0.62) \quad (1.54)^*$$
$$R^2 = 0.99 \quad F = 401$$

Pada sektor konstruksi, pembiayaan dan jumlah bank berhubungan signifikan terhadap PDRB sektor konstruksi. Setiap kenaikan per satu juta rupiah pembiayaan perbankan syariah, maka PDRB sektor pertanian akan naik sebesar Rp 0.89 juta, sedangkan jumlah bank, tiap kenaikan satu unit akan berdampak pada peningkatan jumlah PDRB sektor konstruksi hingga Rp 49,055.85 juta.

3.2.6 Sektor perdagangan, hotel & restoran (S6)

$$S6 = 20072457 + 5.37 P + 21.23 SWBI - 3.58 DPK + 49779.39 JB$$
$$(6.87)^{***} \quad (1.55)^* \quad (1.60) \quad (-0.83) \quad (2.33)^{**}$$
$$R^2 = 0.99 \quad F = 301$$

Sama halnya dengan PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel & restoran akan mengalami kenaikan sebesar Rp 5.37 juta jika pembiayaan perbankan syariah naik sebesar satu juta rupiah. Demikian juga dengan jumlah bank, kenaikan per unit bank akan meningkatkan PDRB sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar Rp 49,779.39 juta.

3.2.7 Sektor pengangkutan dan komunikasi (S7)

$$S7 = 5176696 + 1.58 P + 4.53 SWBI - 0.73 DPK + 101394.5 JB$$
$$(2.91)^{***} \quad (0.55)^* \quad (0.57) \quad (-0.27) \quad (1.09)^*$$

$$R^2 = 0.98 \quad F = 93$$

PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi akan naik hingga Rp 1.58 juta ketika pembiayaan perbankan syariah naik satu juta rupiah. PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi juga akan meningkat sebesar Rp 101,394.5 juta setiap ada penambahan satu unit bank syariah di wilayah tersebut.

3.2.8 Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (S8)

$$S7 = 1352310 + 5.76 P + 2.89 SWBI + 4.61 DPK + 357732JB$$

$$(7.11)^{***} \quad (1.68)^* \quad (0.18) \quad (1.87)^* \quad (0.81)^*$$

$$R^2 = 0.99 \quad F = 43$$

PDRB sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan di suatu daerah akan meningkat sebesar Rp 5.76 juta jika terjadi kenaikan pembiayaan perbankan syariah sebesar satu juta rupiah. PDRB sektor tersebut juga akan mengalami peningkatan hingga Rp 4.61 juta ketika ada kenaikan DPK perbankan syariah satu juta rupiah. Jumlah unit bank syariah juga mempengaruhi PDRB sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. PDRB akan naik Rp 357,732 juta jika ada satu unit bank syariah berdiri.

3.2.9 Sektor jasa-jasa (S9)

$$S9 = 1414353 + 4.67 P + 2.72 SWBI + 5.69 DPK + 19512JB$$

$$(67.48)^{***} \quad (1.62)^* \quad (0.65) \quad (2.02)^* \quad (1.64)^*$$

$$R^2 = 0.99 \quad F = 68$$

PDRB sektor jasa-jasa akan naik Rp 4.67 juta ketika pembiayaan perbankan syariah naik satu juta rupiah. PDRB sektor tersebut juga akan naik Rp 5.69 juta jika DPK perbankan syariah naik satu juta rupiah. Jika berdiri satu unit bank syariah di suatu wilayah, maka PDRB sektor jasa di wilayah tersebut akan naik Rp 19,512 juta.

4. Kesimpulan

4.1 Simpulan penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi 10% dana APBD provinsi akan berimplikasi pada perkembangan perbankan syariah, yang dalam hal ini diukur dengan besarnya penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah dapat dilakukan berbasis otonomi daerah, karena mempunyai *multiplier effect* baik pada perbankan syariah maupun pada Pemda. Salah satu bentuk *multiplier effect* yaitu pertumbuhan sektor riil di tiap daerah, yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Bukti lain yang memperkuat hal ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah > 95%, yang menunjukkan fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik.

Secara sektoral, sembilan sektor penyumbang PDRB provinsi akan meningkat seiring dengan peningkatan penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Di sisi lain, kenaikan DPK akan berdampak positif terhadap kenaikan PDRB beberapa sektor, di antaranya sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Penambahan unit bank di suatu wilayah, akan meningkatkan PDRB semua sektor. Temuan ini memperjelas pernyataan sebelumnya, terkait dengan perlunya optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah berbasis otonomi daerah, dalam rangka pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Untuk mendukung proses optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah, maka jumlah jaringan perbankan syariah harus ditambah, serta diarahkan menjadi *investment bank* dalam jangka panjang. Dengan demikian perkembangan perbankan syariah dan pembangunan daerah di era otonomi daerah dapat berjalan bersama, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

4.2 Saran

Sampel perbankan syariah dalam penelitian ini hanya menggunakan data-data Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah, sebagai proksi dari perbankan syariah, sehingga provinsi yang dimasukkan dalam sampel hanya provinsi yang mempunyai BPD Syariah di wilayahnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan data perbankan syariah per provinsi. Maka dari itu, untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan data perbankan syariah secara nasional agar hasil yang diperoleh lebih relevan dalam menggambarkan pola optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah berbasis otonomi daerah.

4.3 Rekomendasi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pembuat regulasi/ kebijakan khususnya Departemen Keuangan, terkait dengan pengelolaan dana APBN dan APBD, agar sebagian dialokasikan di perbankan syariah, karena sejauh ini pengelolaan dana APBN dan APBD menggunakan *full conventional banking*. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan Bank Indonesia dalam membuat *blue print* pengembangan perbankan syariah, dengan mengarah pada pola *investment bank*, dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Choong, Beng Soon dan Ming Hua Liu. 2009. Islamic Banking: Interest Free or Interest Based. *SSRN*.
- Baltagi, B. H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*, New York: John Wiley and Sons, 1995.
- Farooq, Mohammad Omar. 2007. Partnership, Equity-Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing? *Review of Islamic Economics* Vol. 11, pp. 67-88
- Hausman, J. A. 1978. Specification tests in econometrics. *The Econometric Society*. Vol. 46, No. 6 (Nov., 1978), pp. 1251-1271
- Judge, George G. 1985. *The Theory and Practice of Econometrics*. New York : Wiley
- Khaki, Audil Rashid dan Mohi-ud-Din Sangmi. 2012. Islamic Banking: Concept and Methodology. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 5, No. 4.
- Marothia, D. 2010. Decentralisation of Natural Resource Management in India: An Institutional Perspective. *Indian Journal of Agricultural Economics* 65, no. 1, (January 1): 1-34.
- Mishkin, Frederick. 2011. Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries. *NBER Working Paper* No. 8087. Januari. 2011.
- Pindyck dan Rubinfeld. 2008. *Econometric Models and Economic Forecasts*. Singapore : Prentice Hall
- Richard, Peck. 2005. Local Governance In Africa: The Challenges Of Democratic Decentralization. *Review of Africa Today* 51, no. 3, (April 1): 138-140.
- Seabright, Paul. 2011. Accountability and Decentralization in Government: An Incomplete Contracts Model. *European Economic Review*. Vol. 40 pp 61-89
- Statistik Perbankan Indonesia Agustus 2013, Bank Indonesia
- Statistik Perbankan Syariah Agustus 2013, Bank Indonesia
- Suminto. 2004. Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran, Depkeu)
- Sundararajan, Vesudavan dan Luca Errico. 2012. Islamic Financial Institution and Products In The Global Financial System. Key Issues In Risk Management Chalanges Ahead. *IMF Working Paper*.
- Verbeek, Marno. 2012. *A Guide to Modern Econometrics*. New York : Wiley.